

Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy

(Studi di UPT Puskesmas Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo)

(Vita Novianti¹, Dini Noor Aini Author², Yeni Puspita³)

¹*vitanovianti@unars.ac.id*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Collaborative Service Program and Integration of HIV/AIDS Care Communities at the Kendit Community Health Center, Situbondo Regency. The program focuses on promotional and preventive efforts by involving the transgender community and men who have sex with men (MSM) as key populations. Using a descriptive qualitative approach and Van Meter and Van Horn's implementation theory, this study shows that the program implementation has been quite successful in terms of coordination, implementers' attitudes, and inter-organizational communication. However, challenges remain in terms of resources, particularly budget and time, as well as social environmental barriers that tend to be discriminatory. The success of the program heavily depends on cross-sectoral commitment and local government support to create an inclusive environment and advance HIV/AIDS elimination by 2030.

Keywords: Implementation; Collaborative Service Program; Integration of HIV/AIDS-Concerned Communities

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³ Universitas Jember

Pendahuluan

Penyakit HIV AIDS merupakan permasalahan kesehatan yang perlu ditangani secara terpadu dan komprehensif, tidak hanya melalui sisi kesehatan saja namun juga melalui peran dari *stakeholder* pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan, menjamin ketersediaan layanan kesehatan, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Sedangkan masyarakat berperan dalam memahami cara mencegah penyebaran HIV, serta menghindari stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Penyakit HIV/AIDS memang isu kesehatan yang sensitif karena terkait dengan stigma dan diskriminasi yang masih sering terjadi. Selain kasusnya yang seperti fenomena gunung es, stigma dan diskriminasi juga banyak dialami oleh penderita dan keluarganya. Tingginya stigma masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS menyebabkan banyak perlakuan diskriminatif baik dalam hal pekerjaan, perawatan, pengobatan, pendidikan maupun dalam hal lainnya.

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah suatu virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, kemudian menimbulkan gejala AIDS bagi penderita yang terinfeksi virus. Hal tersebut ditandai dengan gejala tubuh rentan terhadap berbagai penyakit, seperti TB, TORCH dan lain-lain. Sedangkan *Acquired Immuno Deficiency Sindrom* (AIDS) adalah suatu kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang benar-benar menyembuhkan penyakit HIV-AIDS. Hanya pengobatan dengan metode *Antiretroviral Therapy* (ART) yang dapat memperlambat laju perkembangan virus HIV pada penderita. Data Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa sepanjang 2023 ada sebanyak 57.299 orang dengan HIV (ODHIV) dari 6.142.136 orang yang dites HIV. Persentase penemuan kasus HIV pada laki-laki sebesar 71 % dan 29 % pada perempuan. Tercatat ada 5 provinsi dengan kasus AIDS tertinggi sepanjang 2023 meliputi Jawa Barat (2.575 kasus), Jawa Timur (2.434 kasus), Jawa Tengah (2.008 kasus), Bali (1.680 kasus), dan DKI Jakarta (1.229 kasus). Selain itu kasus HIV terbanyak pada periode 2005-2023 meliputi Jawa Timur (86.947 kasus), diikuti DKI Jakarta (86.180 kasus), Jawa Barat (67.851 kasus), Jawa Tengah (54.461 kasus), dan Papua dengan 46.096 kasus.

Gambar 1. Kasus Positif HIV-AIDS di Indonesia, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 – 2023



(Sumber: UPT Puskesmas Kendit 2024)

Gambar 1 menunjukkan jumlah korban positif HIV-AIDS di Kabupaten Situbondo diantara Jawa Timur dan Indonesia. Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo yang menjadi lokus penelitian ini mengalami jumlah kenaikan korban positif HIV-AIDS dari 4 orang di tahun 2022 menjadi 8 orang pada tahun 2023. Kabupaten Situbondo salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki jumlah penderita HIV/AIDS dengan jumlah kasus yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS tahun 2023 mencatat Kabupaten Situbondo sebanyak 1.297 kasus HIV/AIDS pada tahun 2022. Data ini menempatkan HIV/AIDS sebagai salah satu dari 10 penyakit terbanyak yang diderita masyarakat di Situbondo. Di tingkat Jawa Timur, ada 2.434 kasus AIDS, sedangkan di tingkat nasional, diperkirakan terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV. Penularan HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo didominasi akibat hubungan seksual bebas. Penularan lainnya yaitu dari ibu rumah tangga yang tertular HIV/AIDS dari suaminya, PSK (Laki-laki dan perempuan), pengguna narkoba suntik dan pelanggan pekerja seks. Tahun 2023 Kabupaten Situbondo menempati urutan ke-8 di Jawa Timur dengan angka kasus HIV/AIDS sebanyak 50 kasus. Tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo sebanyak 131 kasus.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanggulangan HIV/AIDS, salah satunya melalui kebijakan yang mengutamakan pencegahan, pengobatan, dan pendampingan bagi ODHA (Orang dengan HIV/AIDS). Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual mewajibkan daerah melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mencapai tujuan tersebut. Menyikapi banyaknya temuan kasus HIV/AIDS yang terus bertambah, UPT Puskesmas Kendit yang berlokasi di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo merancang sebuah program inovasi. Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy. Program pelayanan ini adalah salah satu bagian dari pelayanan kesehatan dasar dilaksanakan oleh pihak Puskesmas yang berada pada tingkat kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Kendit khususnya di UPT Puskesmas Kendit. Program ini didesain sebagai upaya promotif dan preventif untuk penanggulangan HIV/AIDS dengan menyelenggarakan layanan yang melibatkan, mengikutsertakan, dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kecamatan Kendit adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Situbondo yang memiliki komunitas waria, yang merupakan salah satu populasi kunci yang berisiko tinggi terjangkit penyakit HIV/AIDS. Penerimaan masyarakat dan sulitnya mendapatkan identitas menjadi beberapa faktor yang menyebabkan mereka memilih untuk turun ke jalan dan bersinggungan dengan HIV/AIDS. Selain itu, terbatasnya lahan kerja juga membuat banyak dari waria terpaksa melakukan pekerjaan yang rentan penyakit yang menyerang imun tubuh.

Kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual mewajibkan daerah melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mencapai tujuan tersebut. Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy juga mengacu pada tujuan global Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu Percepatan Penanggulangan HIV/AIDS

dalam mencapai Eliminasi AIDS tahun 2030. Target mencapai eliminasi sebagaimana keberhasilan SDGs ini tidak dapat dilepaskan dari peranan penting pemerintah dalam hal ini adalah Puskesmas sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dan pelaksana kebijakan pemerintah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, UPT Puskesmas Kendit sudah melaksanakan beberapa kegiatan program pelayanan, diawali dengan terbentunya wadah untuk komunitas waria, penyuluhan tentang penularan dan penyebaran infeksi HIV/AIDS, pelayanan dan pemantauan kesehatan, pemeriksaan sero tes atau tes serologi secara gratis pada waria, pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan Waria dan LSL (Lelaki Suka Lelaki), pengobatan ARV (pengobatan infeksi HIV) secara gratis pada waria dan terbangunnya kesadaran masyarakat untuk tidak mendiskriminasi kelompok waria dan ODHIV (Orang dengan HIV).

Implementasi merupakan dimensi yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan atau program dalam memecahkan masalah publik. Bagian ini merupakan tahap krusial yang menentukan apakah program yang dibuat benar-benar efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Tentunya, dalam implementasi suatu program tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada. Masalah implementasi berkaitan dengan tujuan program dengan realisasi dari program itu sendiri ([Akasah, 2020](#)). Permasalahan yang terjadi dapat dianalisis berdasarkan hambatan yang terjadi dalam mencapai tujuan. Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Kecamatan Kendit dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS ditengarai adanya permasalahan pada proses pelaksanaannya.

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy menunjukkan bahwa program tersebut belum optimal. Pencapaian implementasi tujuan program mengacu pada sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan proses penerapan rencana dan kegiatan yang telah dirumuskan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut ([Akasah, 2020](#)) pencapaian tujuan kebijakan publik hanya mungkin ditentukan jika dapat diketahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan berbagai permasalahan, maka peneliti menganalisis menggunakan teori model implementasi dari Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini menggunakan enam indikator dari teori implementasi Van Horn dan Van Meter, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan agen pelaksana, disposisi pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik ([Agustino, 2014](#)). Lokasi penelitian Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di UPT Puskesmas Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Mengidentifikasi narasumber dalam dengan cara sampling yang ditargetkan, yaitu dengan memilih sumber yang tampaknya mengetahui dengan pelaksanaan Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy. Subjek penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Kendit, Inovator Program, Paguyuban Waria dan Masyarakat Kecamatan Kendit. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan triangulasi data.

Hasil dan Pembahasan

Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam mencegah dan mengendalikan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Terry dalam [Tachjan \(2006:31\)](#) menjelaskan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komperhensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan dan menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran. Sedangkan [Rohman \(2009:101-102\)](#) menyebutkan “Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan dalam konteks penelitian ini, program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy adalah suatu upaya yang dilakukan secara terencana dengan melibatkan berbagai pihak yang berisikan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Program ini merupakan tindaklanjut dari kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual yang harus diimplementasikan dengan baik sehingga angka penyebaran dan penularan HIV/AIDS dapat dicegah dan dikendalikan.

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya yaitu untuk menganalisis Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy oleh UPT Puskesmas Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Kendit dianalisis melalui model implementasi kebijakan dari Van Metter Dan Van Horn (1975) yang terdiri dari enam variabel yaitu a) ukuran dan tujuan kebijakan, b) sumber daya, c) karakteristik organisasi pelaksana, d) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, e) sikap para pelaksana, f) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi program dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan program yang bersifat realistik. Para pelaksana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Kendit sepenuhnya telah mengetahui ukuran dan tujuan program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy. Ukuran program berkaitan dengan

ukuran dasar yang digunakan sebagai pedoman atau acuan baku dalam implementasi program. Ukuran Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Kendit Kecamatan Kendit telah jelas karena telah mengacu dan menyesuaikan pada regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Keseluruhan aturan tersebut dijadikan pijakan untuk melaksanakan program terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Kendit, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang jelas. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat ([Purnamasari & Pradana, 2017](#)) yang menyatakan bahwa selain kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran dan tujuan implementasi juga harus jelas. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan karena apabila ukuran dan tujuan kebijakan tidak jelas maka kebijakan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPT Puskesmas Kendit sudah melaksanakan pelayanan sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku, namun ukuran dan tujuan tersebut masih belum tercapai dikarenakan target-target dalam setiap pelayanan belum sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Target Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Puskesmas Kendit dibagi dalam delapan kategori yakni:

1) Meningkatnya kesadaran, kemauan waria dan masyarakat untuk open status
Langkah awal yang dilakukan UPT Puskesmas Kendit melakukan pertemuan mini lokakarya lintas program dan mini lokakarya lintas sektor membahas penyebaran penyakit AIDS yang semakin meningkat di Kabupaten Situbondo. dalam pertemuan tersebut disampaikan juga salah satu solusi untuk mengurangi penyebaran HIV/AIDS yaitu dengan membentuk suatu paguyuban untuk kelompok waria. Pertemuan tersebut mengundang stakeholder di tingkat kecamatan dan desa, selain itu menghadirkan tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok sasaran. Kepala Puskesmas dalam pertemuan tersebut menjelaskan salah satu solusi untuk mengurangi penyebaran HIV/AIDS yaitu dengan membentuk suatu paguyuban untuk kelompok waria. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemantauan terhadap penyebaran HIV/AIDS pada kelompok waria. Pada awalnya terjadi pro dan kontra pada saat menyampaikan pembentukan paguyuban waria karena dianggap melegalkan penyimpangan perilaku dan akhirnya peserta lintas sektor menyetujui pembentukan paguyuban waria.

2) Terbentunya wadah untuk komunitas waria

Pihak puskesmas melakukan pendekatan secara holistik pada kelompok waria, hal ini tidak mudah dilakukan karena stigma yang terlanjur negatif pada kelompok waria. Setelah beberapa kali melakukan pendekatan ke *base camp* dengan menghormati serta menjaga privasi kelompok waria akhirnya tim puskesmas berhasil membentuk paguyuban waria dan diberi nama "GALAXY". Bermula dari kelompok waria yang berada di Kecamatan Kendit yang menjadi anggota paguyuban GALAXY, kemudian dari kelompok kecamatan lain bahkan dari luar Kabupaten Situbondo (Banyuwangi dan Bondowoso).

3) Penyuluhan tentang penularan dan penyebaran infeksi HIV/AIDS

Penyuluhan rutin tentang penularan dan penyebaran infeksi HIV/AIDS pada komunitas waria untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang risiko dan cara mencegah penularan. Penyuluhan ini harus meliputi informasi tentang cara penularan, pencegahan, pengobatan, dan pentingnya dukungan sosial. Penyuluhan ini dilakukan secara rutin di setiap ada kegiatan yang melibatkan paguyuban GALAXY di UPT Puskesmas Kendit.

4) Pelayanan dan pemantauan kesehatan

Pemantauan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penyakit, terutama penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS, serta mendorong perilaku kesehatan yang lebih baik untuk mencegah penularan penyakit. Pemantauan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan inklusif bagi waria.

5) Pemeriksaan sero tes atau tes serologi secara gratis pada waria

Pemeriksaan serologi (*serologi test*) untuk mendeteksi berbagai infeksi, seperti HIV, sifilis, dan hepatitis melalui layanan kesehatan masyarakat khususnya waria sebagai kelompok rentan. Pelaksanaan pemeriksaan sero tes dapat diakses secara gratis di UPT Puskesmas Kendit secara gratis.

6) Pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan Waria dan LSL (Lelaki Suka Lelaki)

Pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan untuk Waria dan Lelaki Suka Lelaki (LSL) bertujuan untuk mencegah dan mengobati infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS, terutama karena LSL memiliki risiko tinggi terkena penyakit tersebut. Layanan ini mencakup konseling dan tes sukarela (VCT), serta perawatan kesehatan yang komprehensif.

7) Pengobatan ARV (pengobatan infeksi HIV) secara gratis pada waria

Pengobatan ARV untuk infeksi HIV disediakan secara gratis bagi semua orang, termasuk paguyuban waria. Pengobatan ARV dilakukan di semua rumah sakit dan puskesmas, hal ini juga dilakukan di UPT Puskesmas Kendit. Pemerintah menjamin ketersediaan obat ARV dan pengobatannya secara gratis.

8) Terbangunnya kesadaran masyarakat untuk tidak mendiskriminasi kelompok waria dan ODHIV (Orang dengan HIV)

Walaupun masyarakat mulai menunjukkan pemahaman yang lebih besar terhadap kelompok waria dan mulai mengurangi diskriminasi terhadap mereka. Namun dalam hal ini masih banyak tantangan dan hambatan dalam penerimaan waria di masyarakat, khususnya di Kecamatan Kendit.

Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu komponen implementasi yang sangat berpengaruh. Implementasi kebijakan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian proses implementasi kebijakan didapatkan melalui bagaimana mengelola kemampuan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Selain sumber daya manusia, ada sumber daya lain yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu sumber daya finansial dan waktu. Menurut Van Horn dan Van Meter, sumber daya meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu. ([Arifin dan Rahaju, 2014](#)).

1. Sumber Daya Manusia

Program Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Puskesmas Kendit sumber daya manusia yang terlibat dalam program pelayanan kesehatan di Puskesmas Kendit dalam melaksanakan pelayanan program, yaitu Dinas Kesehatan beserta jejaringnya, Camat Kendit, Lintas Sektor (Polsek, Koramil, KUA, Kepala Desa, PKK, TOMA, TOGA) dan Programmer dan staff di Puskesmas Kendit yang berkaitan dengan kegiatan paguyuban Galaxy. Semua sumber daya keuangan dan sumber daya manusia tersebut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan paguyuban Galaxy. Kegiatan ini di tingkatkan melalui serangkaian rapat koordinasi baik lintas program maupun lintas sektor untuk mencapai keberhasilan program. Semua pihak-pihak yang terlibat memiliki tugas serta fungsi masing-masing yang membantu pemantauan serta memberikan sosialisasi secara langsung kepada waria yang sudah tergabung dalam paguyuban dan yang belum.

2. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran adalah sumber daya yang berkaitan dengan pengalokasian dana. Dalam mencapai tujuan kebijakan publik tidak akan berhasil ketika sumber daya manusia berkualitas tersedia, tetapi sumber daya anggaran tidak tersedia. Sumber daya anggaran yang digunakan untuk mendukung Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy hanya menggunakan anggaran UPT Puskesmas Kendit. Berdasarkan hasil penelitian semua program atau kegiatan dalam upaya promosi dan pencegahan penularan HIV/AIDS yang telah disusun oleh para pelaksana kebijakan belum seluruhnya dilaksanakan karena menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia, sehingga mereka menyusun skala prioritas program yang harus didahulukan. Hal ini membuat adanya keterbatasan dalam melaksanakan program-program penanggulangan. Permasalahan terkait anggaran merupakan prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo karena sebagaimana menurut (Amu et al., 2020) bahwa tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Seperti petikan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Anggaran yang dipakai untuk pelaksanaan Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy murni berasal dari UPT Puskesmas, belum ada support anggaran dari pihak lain. Kami memiliki keinginan untuk pengembangan program ini, seperti mendukung anggota paguyuban yang memiliki keahlian seperti memasak dan tata rias. Tapi yaitu, sekali lagi terkendala masalah anggaran yang minim”

3. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu yang dimaksudkan adalah ketepatan waktu para petugas pelayanan dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian jadwal pelaksanaan pelayanan sudah diatur sesuai dengan kesepakatan bersama. Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Seperti petikan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“jadwal pelayanan sudah disepakati bersama antara kami (UPT Puskesmas Kendit) dengan paguyuban. Tapi seringkali dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan optimal karena 30% anggota paguyuban berasal dari luar Kabupaten Situbondo, beberapa

diantaranya berasal dari Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso. Sehingga dengan kegiatan mereka yang mendadak tidak mungkin untuk hadir di UPT Puskesmas Kendit pada jadwal pelayanan yang sudah ditentukan”.

Sumber daya waktu mengikuti target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu tercapainya 3 zero di tahun 2030. Masih ada jangka waktu untuk dapat mencapai target tersebut, oleh karena itu semua pelaksana kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Kendit yang terlibat selalu berusaha agar semua tujuan penanggulangan HIV/AIDS dapat terwujud pada tahun 2030 nantinya. Sumber daya waktu yang tersedia merupakan hal yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena seperti menurut ([Rizzana, 2017](#)) penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang berkaitan dengan waktu.

Dalam indikator sumber daya yang meliputi sumber daya manusia sudah berkolaborasi antar *stakeholder* dan saling mendukung hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan semua pihak pada setiap kegiatan Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy. Namun untuk sumber daya anggaran dan waktu kurang optimal dalam pelaksanaan program. Tidak ada dukungan anggaran dari APBD maupun *stakeholder* lain, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak semua bisa terealisasi. Sedangkan pelayanan program yang diberikan sudah dilaksanakan sesuai jadwal walaupun pada pelaksanaan tidak semua anggota paguyuban bisa mengikuti kegiatan pelayanan yang diberikan UPT Puskesmas Kendit.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan sifat yang dimiliki oleh organisasi pelaksana kebijakan seperti komitmen, disiplin, kecerdasan, integritas, dan sifat demokratis. Karakteristik pelaksana dapat menimbulkan dukungan atau kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan karakteristik organisasi pelaksana program. Oleh karena itu, perlu untuk memilih dan menetapkan para agen pelaksana kebijakan yang memiliki kapasitas dan pengetahuan yang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ([Afandi dan Warjo, 2015](#)).

Organisasi pelaksana dalam Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Puskesmas Kendit meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Kepala Puskesmas, Camat Kendit, Dokter Umum, Programer HIV/AIDS, Programer TB PARU, DIARE, KESPRO, ISPA, Programer laborat, dan Staff Puskesmas. Sehubungan dengan banyaknya agen pelaksana dalam Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Puskesmas Kendit maka harus dapat dikoordinasikan dengan baik supaya tidak ada perbedaan visi dalam pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu fokus yang memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang dikutip oleh ([Fauziyah & Arif, 2021](#)) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan, agar dapat mencapai keberhasilan yang maksimal, maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan aturan, serta pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual dan adanya koordinasi untuk pembagian tugas dan fungsi diharapkan Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Puskesmas Kendit sudah bekerja sesuai dengan tujuan yang ada. Maka permasalahan mengenai virus HIV/AIDS dapat dicegah dan dikendalikan penularannya, jika tujuan dapat tercapai artinya implementasi kebijakan juga akan berhasil dengan baik. Pelaksanakan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS terutama dalam upaya promosi dan pencegahan penularan HIV/AIDS di Kecamatan Kendit juga terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sebagai norma dan aturan dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan. Dengan adanya standart operasional prosedur ini menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan sesuai tujuan dan sasaran kebijakan.

Banyaknya agen pelaksana yang terdapat di dalam implementasi tersebut menunjukkan bahwa adanya keseriusan pelaksana untuk melakukan program tersebut secara baik dan terstruktur. Dampak Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy, diantaranya peningkatan kesadaran waria dan masyarakat untuk open status, waria secara intensif mendapatkan pelayanan kesehatan dan terbangunnya kesadaran masyarakat untuk tidak mendiskriminasi kelompok waria dan ODHIV.

Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan akan tercapai jika terjalin komunikasi antar organisasi. Komunikasi antar organisasi merupakan faktor dalam memastikan seberapa bertanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan komunikasi, kejelasan dan keterpaduan, serta melakukan komunikasi kebijakan antar organisasi.

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di UPT Puskesmas Kendit adalah penyampaian informasi dari penentu kebijakan kepada kepala puskesmas, staf dan operator. Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi biasanya akan didiskusikan langsung dengan mengadakan rapat sesuai dengan penanggungjawab pelaksana program.

Organisasi eksternal yang terlibat dalam Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy adalah Camat yang memiliki tugas memfasilitasi kepada lintas sektor dan tokoh masyarakat serta tokoh agama di Kecamatan Kendit. Sehingga program ini berkolaborasi dengan PKK, Kader Posyandu dan Lembaga Pendidikan (SMP dan SMA). Kolaborasi juga dilakukan dengan lembaga eksternal di luar Kabupaten Situbondo, yaitu Kelompok Kerja Bina Sehat (KBBS) Banyuwangi dan Yayasan Spiritia (lembaga non-pemerintah yang memberi dukungan dan perawatan berkualitas serta menjunjung tinggi hak asasi bagi orang yang terinfeksi HIV di Indonesia).

Selama ini proses hubungan komunikasi berjalan cukup baik diantara pelaksana program baik di internal puskesmas ataupun dengan organisasi eksternal. Untuk koordinasi dilakukan dengan beberapa pertemuan yang dilakukan hanya melalui rapat secara langsung atau rapat melalui aplikasi Whatsapp dan Zoom tetapi informasi yang

disampaikan bisa tersampaikan ke seluruh pelaksana. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa dalam Implementasi kebijakan, sebagaimana dalam realitas program kebijakan, memerlukan terjalinnya hubungan yang baik antar instansi terkait, yaitu dengan adanya dukungan komunikasi dan koordinasi ([Subarsono, 2012](#)). Seperti hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Proses sosialisasi seringkali kami lakukan pada saat pasien datang untuk menerima pelayanan. Petugas pelayanan kami bisa sekaligus menyampaikan beberapa edukasi tentang kesehatan, terutama terkait dengan HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi. Selain itu, mencakup informasi tentang deteksi dini, pencegahan, dan perawatan infeksi, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa komunikasi antar organisasi dalam implementasi kebijakan Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy sudah terlaksana dengan baik dapat ditunjukkan dengan terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi internal maupun eksternal. Komunikasi dengan masyarakat atau pasien juga sudah dilakukan melalui sosialisasi terkait pencegahan dan penularan HIV/AIDS melalui media cetak seperti pembagian brosur dan pemasangan banner dan juga melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau pasien ketika pasien atau pasien datang dan juga menggunakan forum secara online melalui aplikasi sosial media yang ada seperti Whatsapp.

Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana merupakan bagaimana sikap para pelaksana program yakni menerima atau menolak pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan program. Hal ini berdampak terhadap keberhasilan atau kegagalan tujuan implementasi kebijakan publik, para agen pelaksana memerlukan pemahaman atau pemikiran yang sama agar kebijakan yang dikeluarkan dapat diterima oleh semua para pelaksana program kebijakan yang sedang dilaksanakan ([Agustino, 2006](#)).

Sikap agen pelaksana sangat mendukung pelaksanaan kebijakan. Pelaksana seringkali bersedia mengambil inisiatif untuk mencapai kebijakan, tergantung pada lingkup kewenangannya. Karena implementasi kebijakan program memerlukan keterlibatan banyak organisasi dalam implementasinya, koordinasi yang efektif antar organisasi terkait sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi program kebijakan ([Subarsono, 2017](#)).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu paguyuban waria tentang Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy:

“Saat periksa saya dilayani dengan baik, petugasnya ramah. Disini pelayanannya juga cepat sesuai antrian. Kalau saya tanya, juga dijelaskan secara detail. Dan yang pasti sudah tidak ada lagi bisikan atau terwata dari petugas puskesmas ketika kami datang.

Pada penelitian ini sikap pelaksanaan Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Puskesmas Kendit ada dukungan yang positif terlihat dari petugas dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dimana petugas pelayanan memiliki komitmen dalam melaksanakan program. Bentuk

komitmen tersebut adalah memberikan pelayanan dengan sikap yang tanpa pamrih serta mengetahui tugas dan fungsinya.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik memainkan peranan utama dalam proses keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak menguntungkan dapat berkontribusi pada kegagalan implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan yang dilihat dari lingkungan ekonomi, sosial dan politik mengenai Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Kecamatan Kendit dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program di UPT Puskesmas Kendit.

Keadaan lingkungan sosial dimana karakteristik masyarakat yang masih menyepelkan sebuah permasalahan yang sebenarnya penting tetapi dianggap sebuah hal yang biasa sehingga menghambat keberhasilan program. Seperti petikan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Sebagian kecil masyarakat disini masih memiliki pandangan yang negatif kepada kami, bahkan menganggap kami merupakan seseorang yang telah melakukan sesuatu yang menyimpang baik dari sisi sosial maupun agama. Jadi keikutsertaan masyarakat masih sedikit di kegiatan yang melibatkan kami”.

Partisipasi masyarakat perlu menjadi perhatian pelaksana program, bagaimana upaya yang harus dilakukan agar masyarakat bisa mendukung sepenuhnya Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy. Partisipasi yang dimaksud adalah adanya pelayanan yang membuat masyarakat berperan dalam suatu program dengan melihat kebutuhan, keinginan, dan harapan dari masyarakat ([Saputro et al., 2018](#)).

Keadaan politik juga mempengaruhi pelaksanaan keberhasilan program. Unsur politik dalam Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa maupun tokoh masyarakat yang berperan penting dalam program kesehatan di Puskesmas Kendit. Dengan adanya dukungan tersebut program dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seperti petikan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

“Kami berharap ada dukungan lebih dari pemerintah daerah berupa anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Kendit. Selain itu, kami berharap bisa bersinergi dengan desa, baik dalam bentuk program atau dukungan anggaran dari Dana Desa. Sehingga yang kami lakukan bisa optimal sebagai upaya masif untuk mencegah HIV/AIDS dengan strategi utama, termasuk pencegahan kombinasi, edukasi, kampanye, *skrining*, dan akses layanan kesehatan”.

Dengan demikian, diperlukan adanya komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan ekonomi, sosial dan politik dalam mendukung agar Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy dapat berhasil. Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara organisasi atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program dan

masyarakat harus tetap dilaksanakan dengan baik untuk berlangsungnya program supaya bisa berjalan dan mencapai tujuan.

Bagian akhir yang perlu diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Adapun lingkungan eksternal dalam penelitian ini mengacu pada lingkungan sosial yang instrumennya adalah masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Kendit, lingkungan ekonomi yang instrumennya adalah taraf ekonomi masyarakat Kecamatan Kendit, serta unsur dari lingkungan politik yaitu instansi pemerintah baik Bupati maupun jajarannya. Berdasarkan hasil penelitian belum seluruh aspek dari lingkungan eksternal memberikan dukungan dan respon positif terhadap kebijakan ini. Lingkungan politik yang berasal dari instansi pemerintah juga belum secara penuh mendukung adanya kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Situbondo. Belum ada kebijakan yang secara eksplisit mengatur tentang upaya preventif dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Situbondo. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung HIV/AIDS tertuang dalam Perda No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Situbondo. Kebijakan tersebut dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS melalui perilaku seksual berisiko. Namun dukungan tersebut tidak diimbangi dengan dukungan eksternal lainnya yaitu dari masyarakat sebagai instrumen lingkungan sosial dan taraf ekonomi masyarakat sebagai instrumen lingkungan ekonomi.

Hal tersebut dapat dilihat dengan masih adanya sebagian kecil waria yang kembali bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) bahkan secara sembunyi-sembunyi atau terselubung dengan alasan tuntutan ekonomi walaupun sudah ada pendampingan dari UPT Puskesmas Kendit. Keberadaan para WPSL/WPSTL tersebut menyebabkan resiko penularan HIV/AIDS juga semakin besar. Selain itu dari lingkungan sosial juga dapat dilihat dari masih adanya stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHA di Kecamatan Kendit. Padahal dalam melaksanakan kebijakan, dibutuhkan adanya dukungan lingkungan eksternal untuk menunjang keberhasilan kebijakan, karena sebagaimana menurut ([Febriadi, 2019](#)) bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy yang dianalisis melalui teori yang diungkap Van Horn dan Van Meter mengenai indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dapat disimpulkan dengan melihat setiap indikator-indikator yaitu yang pertama, pelaksanaan Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy di Puskesmas Kendit sudah melaksanakan standar dan tujuan kebijakan dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan tetapi dalam pelaksanaannya banyak program belum terealisasi. Dalam indikator sumber daya belum sepenuhnya maksimal dikarenakan pada sumber daya anggaran dan waktu masih belum optimal yakni mengenai belum ada dukungan anggaran dari APBD dan *stakeholder* eksternal lainnya. Pada indikator karakteristik agen pelaksana yaitu

bertumpu pada Peraturan Menteri Kesehatan No 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual. Selain itu sebagai bentuk komitmen UPT Puskesmas Kendit dalam bentuk Surat Keputusan Penguatan Komitmen Pimpinan dan Seluruh Karyawan Puskesmas (Nomor 440/19 /431.302.7.1.8/2023).

Implementasi Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy sudah berjalan dengan baik karena petugas puskesmas sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan dan SOP yang sudah ditetapkan. Dalam indikator sikap pelaksana semua bertugas dengan tidak membedakan waria dengan masyarakat lainnya serta ada dukungan yang positif terlihat dari petugas dalam melaksanakan tugasnya. Untuk indikator komunikasi, komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik dengan selalu berkoordinasi antar organisasi internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu indikator lingkungan sosial, ekonomi dan politik di lingkungan kerja UPT Puskesmas Kendit ini kurang mendukung dikarenakan sebagian masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap keberadaan waria kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. Selain itu tidak optimalnya Program Pelayanan Kolaboratif dan Integrasi Masyarakat Peduli HIV/AIDS Tanpa Diskriminasi Dengan Gabungan Laki-Laki Sexy disebabkan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Daftar Pustaka

Reference to a Journal Publication:

- Amu, M., Wibisono, R., & Mas'udi, W. (2020). Peran sumber daya dalam keberhasilan implementasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(1), 23–35.
- Arifin, Z., & Rahaju, R. D. (2014). Sumber daya dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 45–53.
- Febriadi, F. (2019). Pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(1), 15–27.
- Fauziyah, N., & Arif, M. (2021). Implementasi kebijakan publik dalam perspektif Van Meter dan Van Horn. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 77–88.
- Purnamasari, R., & Pradana, A. (2017). Analisis keberhasilan implementasi kebijakan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 22–31.
- Rizzana, F. (2017). Faktor kegagalan implementasi kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(2), 89–98.
- Saputro, E. P., Widodo, J., & Yuliaty, L. (2018). Peran masyarakat dalam implementasi kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 11–20.

Reference to a Book:

- Afandi, A., & Warijo. (2015). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasi pada pembangunan daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, L. (2014). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

- Akasah. (2020). *Implementasi kebijakan publik*. Semarang: UPT Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS dan Infeksi Menular Seksual*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Rohman, B. (2009). *Pengantar kebijakan publik*. Malang: UMM Press.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, A. G. (2017). *Kebijakan publik dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: APII Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.